

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI 6 PROVINSI PULAU JAWA
(TAHUN 2012-2021)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Lucki Husnul Pikri
Nomor Mahasiswa : 19313109
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA**

2023

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan
Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa
(Tahun 2012-2021)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Lucki Husnul Pikri
Nomor Mahasiswa : 19313109
Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
YOGYAKARTA
2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku

Yogyakarta, 13 September 2023

Penulis,



Lúcki Triusnul Pikri

PENGESAHAN

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan
Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa
(Tahun 2012-2021)

Nama : Lucki Husnul Pikri
Nomor Mahasiswa : 19313109
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 September 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Agus Widarjono MA., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

TOR â€œ FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI 6 PROVINSI PULAU JAWA (TA

Disusun oleh : LUCKI HUSNUL PIKRI

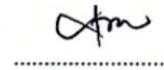
Nomor Mahasiswa : 19313109

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 10 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D



Penguji : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.



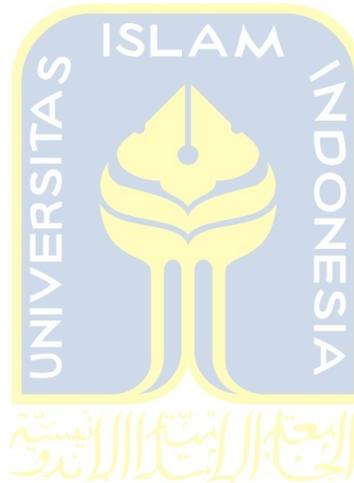
Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Irfan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



PERSEMBAHAN

Terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar – besarnya atas kelancaran selama proses pembuatannya, dengan begitu skripsi ini penulis didedikasikan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmatNya, hingga penulis selalu diberikan pertolongan dan kemudahan selama ini.
2. Kedua orang tua, Bapak H. Rustham Thamrin dan Ibu Hj. Arnida yang selalu memberikan doa dan dukungan dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ketiga Saudara saya Riky Rustam,S.H M.H, Ayu Anggraini,S.psi, dan Muhammad Alfarizi, S.E yang telah memberi saya dukungan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada diri sendiri yang sudah berjuang melawan rasa malas dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena ridhonyalah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa (Tahun 2012 – 2021)”.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari awal hingga selesainya penelitian ini.
3. Dosen, staf pengajar dan karyawan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak H. Rustam Thamrin dan Ibu Hj. Arnida selaku orang tua saya yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Serta ketiga saudara saya Riky Rustam, S.H. M.H., Ayu Anggraini, S.psi, Muhammad Alfarizi, S.E. yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini
5. Untuk teman – temanku yang juga telah banyak memberikan do'a, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. And, thanks for your support, without you I'm nothing dear ~

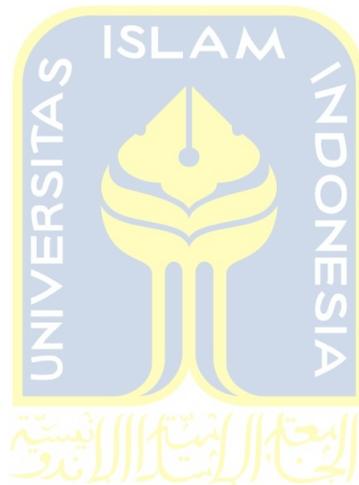
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2023

Penulis,

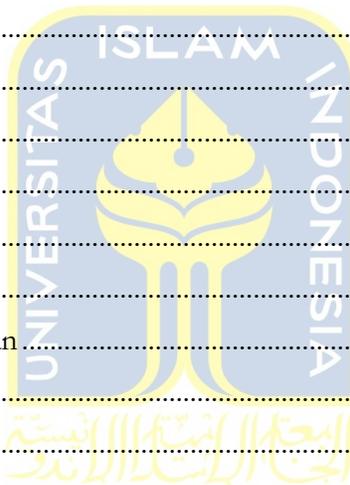
Lucki Husnul Pikri



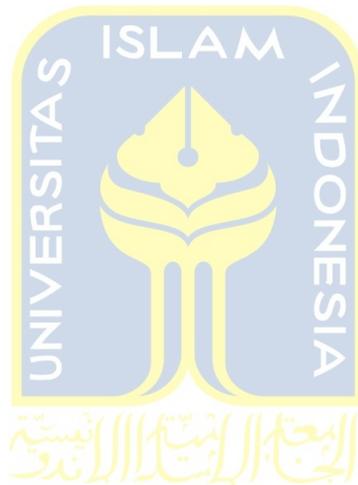
DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Keuangan pusat dan Keuangan daerah.....	8
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah	9
2.2.3 Pajak	11
2.2.4 Pajak Daerah	15
2.2.5 Pengaruh PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Kamar Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa	18
2.3 Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	21
3.1.1 Jenis Data	21

3.1.2 Cara Pengumpulan Data	21
3.2 Variabel Penelitian.....	21
3.2.1 Variable Dependen (Y)	21
3.2.2 Variabel Independen (X).....	22
3.3 Metode Analisis	22
3.3.1 Common Effects Models.....	23
3.3.2 Fixed Effects Models.....	24
3.3.3 Random Effects Models	25
3.4 Uji Pemilihan Model	26
3.4.1 Uji Chow (Uji F).....	26
3.4.2 Uji Hausman	27
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)	27
3.4.5 Uji F	28
3.4.6 Uji t.....	28
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Deskriptif Data Penelitian.....	29
4.2 Data Deskriptif Statistik	29
4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	32
4.3.1 Model Common Effect.....	32
4.3.2 Model Fixed Effect.....	32
4.3.3 Model Random Effect.....	33
4.4 Pemilihan Model Terbaik.....	34
4.4.1 Uji Chow	34
4.4.2 Uji Hausman	35
4.4.3 Hasil Uji.....	35
4.5 Pengujian Hipotesis.....	36
4.5.1 Koefisien Determinasi (R ²)	36
4.5.2 Uji F	36
4.5.3 Uji t.....	37
4.5.4 Interpretasi Koefisien	38
4.6 Hasil Analisis Data	39
4.6.1 Analisis PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	39

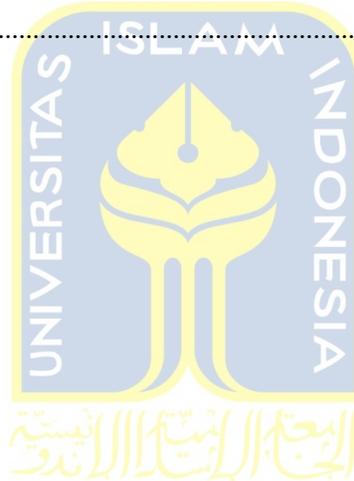


4.6.2 Analisis Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	39
4.6.3 Analisis Kendaraan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	40
4.6.4 Analisis Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	40
BAB V	42
Simpulan dan Implikasi	42
5.1 Simpulan	42
5.2 Implikasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PAD 6 Provinsi Pulau Jawa Pada Tahun 2021	3
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Statistik.....	30
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Common Effect</i>	32
Tabel 4.3 Hasil Uji Fixed Effect	33
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Random Effect</i>	33
Tabel 4.5 Hasil Uji F-test/Chow Test	34
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Test.....	35
Tabel 4.7 Hasil Uji Random Effect Model.....	36
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	36
Tabel 4.9 Uji F.....	36
Tabel 5.0 Uji t.....	37
Tabel 5.1 Interpretasi Koefisien	38



ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini timbul karena pajak lokal memiliki peran krusial sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memainkan peran penting dalam pembiayaan pemerintahan dan perkembangan daerah. Kontribusi terbesar terhadap total PAD berasal dari penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan bermotor, serta jumlah kamar hotel terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa selama periode 2012 – 2021.

Sumber data untuk penelitian ini adalah data time series dari tahun 2010 hingga 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 6 provinsi pulau jawa. Penelitian ini juga mengandalkan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Untuk menganalisis efek PDRB, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan bermotor, serta jumlah kamar hotel terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa, digunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan model common effect, model fixed effect, model random effect. Proses pengujian melibatkan juga pemilihan model terbaik seperti uji chow, uji hausman. Selain itu juga menggunakan uji statistik seperti koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen PDRB dan variabel jumlah kamar hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah. Namun, variabel independen lainnya seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : Penerimaan Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan bermotor, dan jumlah kamar hotel.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, Negara Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau, dan dimana 7000 pulau nya berpenghuni, Indonesia memiliki beberapa pulau utama seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, selain itu juga Indonesia memiliki beberapa pulau kecil seperti Gili, Karimunjawa, Lombok, dan lain-lain. Pulau-pulau kecil tersebut menyimpan sejuta wisata sehingga pulau-pulau kecil tersebut merupakan tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan luar negeri. Dan dari banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 275,77 juta jiwa pada tahun 2022.

Jumlah itu tersebar di wilayah Indonesia yang mencakup dari Sabang sampai Merauke, dan dari jumlah penduduk Indonesia tersebut, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Maka dari itu, agar tidak ada nya ketimpangan dan diskriminasi masyarakat, selama ini Indonesia telah menginisiasi sebuah gerakan pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dari segi materi maupun spiritual. Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, pengembangan wilayah merupakan elemen integral dari upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk memajukan daerah dan mengkoordinasikan pertumbuhan antar wilayah. Pendekatan ini disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah guna meningkatkan kemampuannya.

Kebijakan otonomi daerah yang resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menuntut setiap wilayah untuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pengeluaran pemerintah dalam menjalankan administrasi daerah serta memajukan berbagai sektor seperti pelayanan publik, kemandirian wilayah, dan daya saing wilayah dalam proses pertumbuhan (HAW. Widjaja, 2002). Sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah di seluruh Indonesia, pemerintah pusat juga mengimplementasikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menekankan pada otonomi daerah, serta

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang memberikan pemerintah daerah wewenang lebih besar dalam mengatur anggaran daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan dengan memberikan kewenangan yang luas, jelas, dan tanggung jawab kepada daerah secara adil, dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004). Melalui pemberian kewenangan ini, peran keuangan wilayah akan semakin signifikan karena pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam mengurus sumber daya keuangannya sendiri. Ini berarti bahwa wilayah yang mandiri harus memiliki kapasitas untuk menghasilkan sumber dana sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi komponen utama dalam keuangan daerah (Tambunan, 2001). Dalam menghadapi kebijakan otonomi daerah, penting untuk menganalisis dan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah tersebut secara optimal untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah itu sendiri. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, maka semakin memungkinkan wilayah tersebut untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Juli Panglima Saragih, 2000).

Pulau Jawa adalah sebuah pulau yang terletak di Rentang koordinat antara $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ lintang selatan dan $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ bujur timur Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau besar dan terkenal dengan penduduknya yang padat. Sekitar 60% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal di pulau Jawa. Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia terletak di bagian barat pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, karena disinilah berlangsung banyak peristiwa bersejarah. Di masa lalu, pulau Jawa menjadi pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, dan juga menjadi pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, diketahui juga bahwa sekitar 58% produk domestik bruto (PDB) atau perputaran uang se-Indonesia berada di Pulau Jawa, maka dampak dari pulau ini sangat signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Pada pulau Jawa terdapat enam provinsi yang mencakup 119 kabupaten dan kota. Dari total tersebut, 85 kabupaten dan 34 kota membentuk komposisi tersebut. Berikut rinciannya:

- a. Provinsi Banten memiliki total 8 wilayah administratif yang terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota.

- b. Provinsi DKI Jakarta memiliki total 6 entitas administratif yang terdiri dari 1 kabupaten dan 5 kota.
- c. Provinsi Jawa Barat memiliki keseluruhan 27 entitas administratif yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.
- d. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 entitas administratif yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.
- e. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total wilayah administratif mencakup 5 entitas yang terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota.
- f. Provinsi Jawa Timur memiliki total entitas administratif berjumlah 38 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.

Berdasarkan pernyataan diatas, menjelaskan bahwa pulau jawa terdapat 6 provinsi dan masing-masing provinsi tersebut mempunyai hak otonomi daerah guna mengatur dan mengurus pendapatan daerah mereka sendiri. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dari 6 provinsi yang ada di pulau jawa melakukan salah satu pendekatan yaitu dengan melalui pengumpulan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam PAD, dapat ditingkatkan potensinya dan prospeknya dengan mengambil tindakan strategis, termasuk optimalisasi sumber pendapatan pajak daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional. Berikut jumlah PAD masing-masing provinsi yang ada di pulau jawa pada tahun 2021.

Tabel 1.1 Jumlah PAD 6 Provinsi Pulau Jawa Pada Tahun 2021

No.	Provinsi	Tahun	Jumlah PAD
1.	Provinsi Banten	2021	Rp. 15.672.703.022
2.	Provinsi DKI Jakarta	2021	Rp. 41.610.000.000.000
3.	Provinsi Jawa Barat	2021	Rp. 25.066.632.129
4.	Provinsi Jawa Tengah	2021	Rp. 14.975.030.288
5.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2021	Rp. 1.792.300.713.745
6.	Provinsi Jawa Timur	2021	Rp. 18.935.885.925.145

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau yang bisa disingkat dengan PAD. PAD provinsi DKI Jakarta masih tertinggi dibanding dengan provinsi lainnya yang ada di pulau jawa. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen, salah satu komponen yang penting adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, yang antara lain sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan PDRB dengan Pendapatan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa ?
2. Bagaimana hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Pendapatan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa?
3. Apa kaitan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa?
4. Bagaimana keterkaitan antara Jumlah Kamar Hotel bintang dan non bintang dengan Pendapatan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji mengenai pengaruh PDRB terhadap pendapatan pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa.
2. Meneliti pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap penerimaan pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa.
3. Mengkaji pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa.
4. Mengkaji mengenai pengaruh Jumlah Kamar Hotel bintang dan non bintang terhadap penerimaan pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan suatu kebijakan lagi yang sangat efisien guna untuk meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah.

2. Bagi Masyarakat

Pengetahuan bagi masyarakat terutama wajib pajak agar mengetahui bahwa penting nya membayar pajak.

3. Bagi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, dan perbandingan penelitian lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bab 1 Pendahuluan.

Pada bab 1 pendahuluan ini akan mengandung beberapa sub-bab yang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori.

Pada bab II ini terdapat kajian pustaka dan landasan teori, Kajian pustaka merupakan suatu pengkajian dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Sedangkan landasan teori merupakan suatu teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

3. Bab III Metode Penelitian.

Bab III ini akan menguraikan tentang jenis dan cara mengumpulkan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Analisis.

Pada bab ini, terdapat dua bagian utama. Yang pertama adalah deskripsi data penelitian, di mana data yang digunakan dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Bagian ini mencakup presentasi data yang digunakan dalam penelitian. Bagian kedua adalah hasil dan analisis, di mana temuan-temuan dari penelitian tersebut dipaparkan dan dianalisis secara mendalam. Dalam bagian ini, penulis menggambarkan hasil dari penelitian dan melakukan analisis mendalam terhadap temuan tersebut.

5. Bab V Simpulan dan Implikasi.

Simpulan adalah ringkasan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Implikasi merujuk pada konsekuensi atau dampak dari simpulan tersebut, dan berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

6. Bab Akhir.

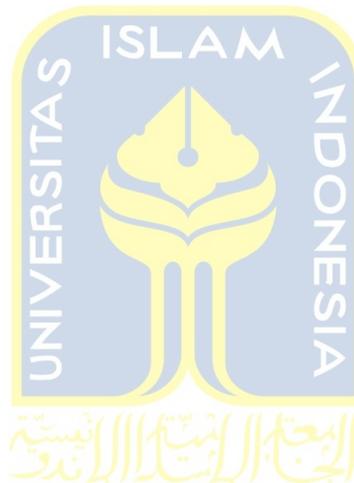
Pada bab akhir ini akan terdiri dari dua hal yang antara lain:

a. Daftar pustaka

Daftar pustaka akan disusun seperti proposal penelitian pada umumnya.

b. Lampiran

Bagian lampiran ini akan digunakan untuk menampilkan data atau keterangan lainnya yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan pada bagian inti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

a. 2.1 Kajian Pustaka

Dalam studi yang dilakukan oleh Maskur (2018), ia menginvestigasi dampak dari Inflasi, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah industri terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sementara itu, ditemukan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, begitu pula dengan jumlah industri yang berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda (Multiple Linear Regression Method).

Sari dan Ilyas (2019) menganalisis dampak dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, sementara Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, inflasi juga tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi linear berganda (Multiple Linear Regression Method).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Lumy et al., 2018) menganalisis efek dari Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, PDRB juga memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, dan Inflasi berperan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Sulawesi Utara. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda (Multiple Linear Regression Method).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Anatoly Aditya Saputra, 2018) melakukan analisis terhadap dampak Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Daerah. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel PDRB

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Kerinci. Sebaliknya, Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Method).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Patel & Goyena, 2019) melakukan analisis mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Tenaga Kerja Asing, Jumlah Penerbitan STNK Balik Nama, dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dari hasil studi ini disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sementara itu, Jumlah Tenaga Kerja Asing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tidak ditemukan pengaruh signifikan antara Jumlah Penerbitan STNK balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, Inflasi berperan secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode regresi linear berganda (Multiple Linear Regression Method).

b. 2.2 Landasan Teori

i. 2.2.1 Keuangan pusat dan Keuangan daerah

Hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah merupakan hasil yang wajar dari sistem pemerintahan negara yang membagi tanggung jawab administratif secara hierarkis kepada daerah-daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan internal mereka sendiri. Regulasi terkait hal ini diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai hasil dari itu, terjadi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Berikut adalah pembagian tugas yang tercantum dalam undang-undang tersebut:

1. Desentralisasi: Merupakan proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah otonom yang menjadikan urusan tersebut menjadi tanggung jawab mereka sendiri.
2. Dekonsentrasi: Merupakan proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dan dari daerah ke desa dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia juga turut disertakan dalam proses ini. Pelaksanaan

tugas tersebut harus dilaporkan dan bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan tugas tersebut.

Dalam Pasal 5 dari Undang-Undang No.33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Penerimaan Daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Oleh karena itu, jumlah pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah tersebut.

Untuk memastikan kepastian sumber pembiayaan tersebut, daerah menerima dana perimbangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

ii. 2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah berasal dari beberapa sumber berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah:

Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah sumbangan yang harus diwajibkan oleh perorangan atau entitas kepada wilayah tertentu tanpa memperoleh imbalan segera. Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan regulasi hukum yang berlaku dan digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan setempat dan proyek-proyek pembangunan daerah. Pengaturan tingkat pajak dan prosedur pemungutan dilaksanakan melalui Peraturan Daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah mengacu pada pembayaran yang diwajibkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau entitas sebagai ganti layanan atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan mereka. Penetapan tarif dan langkah-langkah pengumpulan Retribusi Daerah juga diatur oleh Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

c. Hasil Olahan Aset Daerah

Hasil Kelola Aset Terpisah Daerah melibatkan pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, termasuk bagian laba yang berasal dari entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan yang dihasilkan dari kemitraan dengan pihak ketiga. Penerimaan ini timbul dari pengelolaan properti yang dimiliki oleh pemerintah daerah, mengikuti prinsip-prinsip manajemen bisnis, sambil tetap memperhatikan aspek layanan publik. Sebagian dari surplus tersebut diwajibkan untuk disalurkan kembali kepada wilayah setempat.

2. Uang Perimbangan

Uang perimbangan merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka menjaga keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Uang Perimbangan ini terbagi menjadi 3 yang antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum atau yang disingkat DAU merujuk pada dana yang berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan meratakan kapasitas keuangan di antara wilayah-wilayah daerah guna mendukung pembiayaan keperluan setiap daerah. Dan mensejahterakan masyarakat.

b. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus atau yang biasa disingkat menjadi DAK merupakan dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang diberikan kepada wilayah tertentu dengan maksud mendukung pendanaan kegiatan khusus yang termasuk dalam lingkup tanggung jawab daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil atau yang biasa disingkat DBH adalah suatu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan proporsi persentase guna membiayai keperluan daerah dalam upaya mewujudkan pelaksanaan desentralisasi.

3. Pendapatan Daerah Lainnya

Pendapatan daerah yang sah yang termasuk dalam kategori lainnya adalah semua pendapatan yang diterima oleh daerah selain pendapatan yang berasal dari sumber asli daerah dan pendapatan yang diterima melalui transfer. Jenis pendapatan ini mencakup hibah, dana darurat, serta berbagai jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

a. Hibah

Hibah merujuk pada pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah daerah, yang telah ditetapkan spesifik tujuannya, bersifat sukarela dan tidak meningkat seiring waktu, tidak dilakukan secara terus-menerus, dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan tugas pemerintah daerah.

b. Uang Darurat

Dana Darurat merujuk pada alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada wilayah yang menghadapi bencana nasional, kejadian luar biasa, atau krisis keuangan yang serius. Dana Darurat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi daerah tersebut.

iii. 2.2.3 Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran yang diamanatkan oleh hukum kepada negara, yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas secara obligatory, tanpa menerima imbalan langsung, dan diperuntukkan sebesar mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Berbagai pakar telah memberikan beragam penjelasan mengenai pajak. Berikut adalah beberapa pengertian tentang pajak menurut beberapa ahli:

a. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Berdasarkan buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”. Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. menjelaskan bahwa “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

b. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Berdasarkan disertasi Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang berjudul “pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”. Beliau menjelaskan bahwa “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

1. Fungsi dari pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi dari pajak itu terdiri dari 2 yang antara lain:

a. Fungsi finansial

Fungsi finansial atau dengan kata lain budgetair adalah memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi regulerend

Fungsi regulerend atau dengan kata lain mengatur adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2. Cara Pemungutan Pajak

Pada pajak penghasilan terdapat 3 macam cara untuk memungut pajak yang antara lain:

a. Asas Domisili

Pada asas ini, pemungutan pajak harus berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara tempat tinggal wajib pajak berhak untuk memungut pajak tanpa memandang dari mana hasil pendapatan diperoleh.

b. Asas Sumber

Kemudian pada asas ini pemungutan pajak harus berdasarkan sumber pendapatan wajib pajak di dalam suatu negara

c. Asas Kebangsaan

Dan yang terakhir asas kebangsaan, pemungutan pajak dalam asas ini harus didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut buku yang ditulis Adam Smith pada abad ke-18, yang berjudul “ *An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of nations.*” Adam Smith menjelaskan bahwa asas-asas pemungutan pajak terdiri dari 4 yang antara lain:

a. Equality

Pada asas ini , beban pajak yang diberikan kepada subjek pajak hendaknya seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, dan pada asas ini negara tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi antara sesama wajib pajak.

b. Certainty

Pada asas ini pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak boleh kompromi, kepastian hukum yang diutamakan pada asas ini mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of payment

Pemungutan pajak hendaknya perlu dipungut pada saat mendekati diterimanya penghasilan.

d. Economic of collections

Dalam pemungutan pajak, biaya yang dikeluarkan harus sedikit daripada penerimaan pajak yang diperoleh.

4. Sistem Pengenaan Pajak

Di Indonesia sistem pengenaan pajak terdiri dari 3, yakni :

a. Self Assessment System

Dalam sistem Self Assessment System ini merupakan sistem pengenaan pajak yang jumlah pajaknya harus dibayar dan ditentukan oleh para wajib pajak. Dalam konteks ini, tugas menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri. Institusi pengumpul pajak memiliki peran pengawasan dengan melakukan serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum, seperti melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait pajak.

b. Official Assessment System

Dalam kerangka sistem perpajakan ini, jumlah pajak yang harus dibayarkan sepenuhnya ditentukan oleh institusi yang mengumpulkan pajak. Para wajib pajak dalam situasi ini memiliki peran yang pasif dan menunggu pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang ditetapkan oleh lembaga pengumpul pajak.

c. With Holding System

Jumlah pajak dihitung oleh entitas ketiga yang tidak termasuk dalam kelompok wajib pajak maupun aparat pajak atau fiskus.

5. Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5-6) klasifikasi pajak dibedakan menjadi 3, yaitu pajak berdasarkan cara pemungutannya, pajak berdasarkan sifatnya, pajak berdasarkan lembaga pemungutannya.

a. Berdasarkan cara pemungutannya

a) Pajak Langsung adalah Pajak yang tanggungannya dikenakan langsung pada wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Secara lebih tepat, tugas membayar pajak harus dijalankan sendiri oleh wajib pajak yang terkait.

b) Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang beratnya bisa dipindahkan kepada individu lain karena pajak ini tidak memiliki dokumen resmi yang menyatakan jumlahnya. Dengan kata lain, pungutan pajak tidak terjadwal secara rutin, tetapi terhubung dengan aktivitas atau kejadian tertentu, sehingga pelunasan pajak bisa didelegasikan kepada orang lain.

b. Berdasarkan Sifatnya

a) Pajak Subjektif adalah Pajak yang mendasar atau bergantung pada subjeknya, dengan mempertimbangkan situasi finansial wajib pajak.

b) Pajak Objektif adalah Pajak yang dasarnya terletak pada karakteristik objeknya, tanpa mempertimbangkan situasi finansial wajib pajak.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat adalah Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung keuangan negara. Pajak pusat memiliki peran sentral dalam struktur finansial suatu negara, karena pendapatan pajak yang terkumpul oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b) Pajak Daerah adalah Pajak yang dikumpulkan dan diatur oleh Otoritas Daerah serta digunakan untuk mendorong perkembangan atau kemajuan ekonomi di wilayah tersebut.

iv. 2.2.4 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pada pasal 1 ayat 10. Pajak daerah merupakan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas terhadap Pemerintah Daerah, yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah semaksimal mungkin.

1. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2016), ciri-ciri pajak daerah terdapat 4 macam yang antara lain:

- a. Pajak Daerah berasal dari pungutan pajak yang semula merupakan hak negara, kemudian dialihkan ke tingkat daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dikenakan di wilayah administratif yang dikelolanya.
- c. Pajak daerah dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan dan pengeluaran terkait pembangunan serta operasional pemerintahan di tingkat daerah.
- d. Pajak daerah dikumpulkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang, sehingga menyebabkan subjek pajaknya dapat dipaksakan untuk membayar pajak.

2. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel, dijelaskan bahwa Pajak Hotel merujuk kepada pungutan atas berbagai layanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan, istilah "Hotel" mengacu pada struktur bangunan yang dirancang khusus untuk memberikan tempat menginap atau beristirahat kepada individu, dan juga menyediakan layanan serta fasilitas lainnya dengan pembayaran yang dikenakan.

b. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, dijelaskan bahwa Pajak Restoran merujuk kepada pungutan

atas berbagai layanan yang diberikan oleh restoran. Sementara itu, istilah "Restoran" mengacu pada lokasi di mana seseorang bisa menikmati makanan dan minuman, serta fasilitas lainnya dengan membayar.

c. Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, ditegaskan bahwa Pajak Hiburan mengacu pada pungutan atas pelaksanaan berbagai bentuk hiburan. Sementara itu, "Hiburan" merujuk pada berbagai jenis acara, pertunjukan, permainan, aktivitas berbasis keterampilan, atau keramaian dalam berbagai nama dan bentuk, yang disaksikan atau dinikmati oleh individu dengan membayar.

d. Pajak Reklame

Berdasarkan regulasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, dijelaskan bahwa Pajak Reklame merujuk kepada pungutan yang berhubungan dengan pengelolaan reklame. Sedangkan, istilah "reklame" mengacu pada benda, alat, atau sarana yang digunakan dengan beragam bentuk dan desainnya untuk tujuan komersial, guna memperkenalkan produk, layanan, atau individu tertentu, yang ditempatkan di lokasi khusus.

e. Pajak Penerangan Jalan

Menurut aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, ditegaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan merujuk kepada pungutan terkait penggunaan daya listrik dengan persyaratan bahwa di kawasan daerah tersebut terdapat fasilitas pencahayaan jalan, yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 8 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Menjelaskan bahwa Pajak atas bahan mineral non-logam dan batuan yang dikenal sebagai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewajiban finansial daerah terhadap ekstraksi bahan mineral non-logam dan batuan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku saat ini.

g. Pajak Parkir

Menurut peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, dijelaskan bahwa Pajak Parkir merujuk kepada pungutan yang dikenakan pada kegiatan pengaturan lahan parkir di luar badan jalan oleh individu atau entitas, baik yang disediakan dalam konteks usaha inti maupun yang dipersembahkan sebagai kegiatan usaha terpisah, termasuk fasilitas penitipan dan tempat parkir kendaraan bermotor yang dikenai biaya.

h. Pajak Air Tanah

Berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah, ditegaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah kewajiban finansial atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Definisi Air Tanah adalah air yang berada dalam formasi tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Pajak Sarang Burung Walet, yang akan disebut sebagai Pajak, merujuk kepada kewajiban finansial yang terkait dengan kegiatan pengambilan dan/atau pengelolaan Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Regulasi dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Kota, menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Kota merujuk kepada pajak yang diterapkan pada kepemilikan, pengendalian, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau struktur fisik oleh individu atau entitas dalam sektor pedesaan dan perkotaan, kecuali lahan yang digunakan untuk kegiatan di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pungutan terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merujuk pada tindakan atau peristiwa hukum

yang menghasilkan hak kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan oleh individu atau entitas.

3. Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dijelaskan bahwa tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar :

- 1). Tarif Pajak Hotel sebesar 10%
- 2). Tarif Pajak Restoran sebesar 10%
- 3). Tarif Pajak Hiburan sebesar 35%
- 4). Tarif Pajak Reklame sebesar 25%
- 5). Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%
- 6). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25%
- 7). Tarif Pajak Parkir sebesar 30%
- 8). Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%
- 9). Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%
- 10). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0.3%
- 11). Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

v. **2.2.5 Pengaruh PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Kamar Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa.**

1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan total nilai tambah produk dan layanan yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah selama satu tahun. Terdapat dua cara menghitung PDRB: menggunakan harga saat ini (harga berlaku) dan menggunakan harga pada tahun tertentu (harga konstan). Dalam metode harga berlaku, nilai produk dan layanan dihitung berdasarkan harga pada tahun yang sedang berlangsung, termasuk fluktuasi harga. Pada metode harga konstan, nilai produk dan layanan dihitung dengan merujuk pada harga pada tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB, di mana semakin tinggi PDRB mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi terkait erat

dengan proses peningkatan produksi barang dan layanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika nilai PDRB suatu daerah semakin tinggi, potensi penerimaan keuangan daerah juga akan semakin besar (Thamrin, 2001). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Kenaikan pendapatan masyarakat akan berdampak pada peningkatan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Tambahan pula, semakin tinggi pendapatan individu, maka semakin besar pula kemampuan mereka untuk membayar berbagai jenis pungutan, termasuk pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Apabila melihat dari makna asal kata "wisatawan," yang berasal dari kata "wisata," sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai sebagai pengganti kata "tourist" dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari bahasa Sansekerta "wisata," yang memiliki arti "perjalanan," dan memiliki kesamaan dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, dalam konteks ini, "wisatawan" secara esensial serupa dengan kata "traveler," karena dalam bahasa Indonesia umumnya menggunakan akhiran "wan" untuk mengindikasikan seseorang berdasarkan profesinya, keahliannya, jabatannya, dan kedudukannya (Irawan, 2010:12).

3. Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor mencakup seluruh perangkat beroda dan komponennya yang digunakan di berbagai jenis jalan raya, dan ditenagai oleh alat teknik seperti mesin atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi gerakan kendaraan. Ini termasuk kendaraan berat dan besar yang menggunakan roda dan mesin dalam operasinya dan tidak tetap dipasang, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan. Dalam hal ini pengenaan pajaknya berdasarkan 2 unsur, yakni : Nilai jual terhadap kendaraan bermotor tersebut, bobot

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4. Jumlah Kamar Hotel

Amenitas Pariwisata merujuk kepada sarana yang tersedia di suatu daerah tujuan pariwisata atau destinasi, seperti akomodasi seperti hotel, restoran, tempat makan, fasilitas olahraga, dan lainnya yang disediakan untuk para wisatawan. Selain dari atraksi wisata itu sendiri, para pelancong juga membutuhkan fasilitas yang mendukung perjalanan mereka dan memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam rangka meningkatkan pengalaman rekreasi mereka. Salah satu dari sarana pendukung dalam wisata adalah hotel. Hotel merupakan Sebuah bangunan yang menawarkan layanan jasa menginap bersama dengan penyediaan makanan dan minuman bagi para pengunjungnya, serta memiliki beragam fasilitas pelayanan lainnya. Semua fasilitas ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pengenaan tarif pajak pada hotel berdasarkan total biaya atau jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel tersebut. Dan semakin banyak kamar hotel yang ditempati oleh pengunjung, maka semakin banyak juga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

c. 2.3 Hipotesis Penelitian

2. Diperkirakan bahwa perubahan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.
3. Diperkirakan bahwa perubahan variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan (WISATAWAN) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.
4. Diperkirakan bahwa perubahan variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (KENDARAAN) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.
5. Diperkirakan bahwa perubahan variabel Jumlah Kamar Hotel (HOTEL) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

i.3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dibuat oleh pihak lain yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di 6 provinsi pulau jawa. Dikarenakan pulau jawa terdiri dari 6 provinsi dan pulau jawa merupakan pulau yang dengan populasi mencapai 136 juta jiwa, selain itu. Pada kuartal pertama tahun 2023, Pulau Jawa masih tetap berperan sebagai pendorong utama ekonomi nasional, memberikan kontribusi sebesar 57,17 persen, sementara pertumbuhannya mencapai 4,96 persen. Data yang digunakan adalah data sekunder selama sepuluh tahun.

ii.3.1.2 Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder bersumber dari :

1. Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Pusat Statistik 6 Provinsi pulau jawa 2012-2021
2. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku-buku dengan melakukan analisis yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

b. 3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang dapat dikategorikan menjadi dua yang antara lain variabel dependen dan variabel independen.

i.3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah data penerimaan pajak Daerah 6 provinsi di pulau jawa. Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dan pada variabel penerimaan pajak daerah ini menggunakan dalam satuan jutaan rupiah.

ii.3.2.2 Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan variabel independen menjadi empat kategori yang antara lain :

1. PDRB atas harga konstan tahun 2010 di 6 provinsi Pulau Jawa

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang dihasilkan dari produksi dalam wilayah dan dalam waktu tertentu. Pada variabel PDRB ini menggunakan dalam satuan jutaan rupiah. Dan di penelitian ini menggunakan Data PDRB harga konstan tahun 2010.

2. Jumlah Kunjungan Wisata di 6 provinsi pulau Jawa

Jumlah Kunjungan Wisata merupakan orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata dalam waktu tertentu. Pada variabel kunjungan wisata ini menggunakan dalam satuan jiwa.

3. Jumlah Kendaraan Bermotor di 6 provinsi pulau Jawa

Jumlah Kendaraan Bermotor merupakan jumlah total keseluruhan kendaraan beroda yang digerakkan oleh mesin serta dapat digunakan diseluruh jenis jalan darat. Pada variabel jumlah kendaraan bermotor ini menggunakan dalam satuan unit.

4. Jumlah Kamar Hotel di 6 provinsi pulau Jawa

Jumlah Kamar Hotel adalah jumlah keseluruhan kamar hotel baik hotel bintang dan hotel non-bintang. Pada variabel jumlah kamar hotel ini menggunakan dalam satuan unit.

c. 3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini terdapat metode regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel bebas (PDRB, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan bermotor, jumlah kamar hotel) dengan variabel terikat (Pajak Daerah). Data yang digunakan adalah data Time series yang mencakup periode tahun 2012-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan dan mengidentifikasi pengaruh yang dihasilkan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk melakukan analisis data dan memperoleh hasil yang akurat, penulis menggunakan aplikasi yang bernama E-views dengan model estimasi dasar Ordinary Least Squares (OLS). Model OLS digunakan untuk mengestimasi persamaan yang memodelkan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menggunakan model ini, penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana pengaruh variabel PDRB, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah kendaraan bermotor, serta jumlah kamar hotel terhadap variabel Pajak Daerah. Untuk mengetahui fungsi model yang baik dimana hasil regresi model log linier lebih baik dari pada model linier atau sebaliknya. Formulasi regresi linier berganda dari model ini adalah sebagai berikut :

$$Y=f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Y = Penerimaan Pajak Daerah (jutaan rupiah)

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (jutaan rupiah)

X2 = Jumlah Kunjungan Wisata (satuan jiwa)

X3 = Jumlah Kendaraan Bermotor (satuan unit)

X4 = Jumlah Kamar Hotel (satuan unit)

e = Variabel pengganggu/ error

Dalam perumusan model ini bentuk umum dari regresi berganda linier sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dari formulasi yang telah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa variabel dependen (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel independen (X1,X2,X3,X4), untuk mengestimasi data sekunder tersebut, terdapat 3 cara pendekatan yang antara lain Common Effects Models, Fixed Effects

models, dan Random Effects Models. Kemudian untuk menentukan model terbaiknya penulis menggunakan beberapa cara yang antara lain Uji Chow test, Uji Hausman dan uji LM.

i.3.3.1 Common Effects Models

Model common effect adalah pendekatan yang sangat dasar dalam melakukan estimasi pada data panel, dimana pendekatan ini menggabungkan data lintas seksi dengan data deret waktu dan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) dalam proses estimasi model data panel tersebut (Widarjono, 2009). Model ini memiliki prasyarat bahwa nilai intersep dan kemiringan (slope) tetap konsisten baik dalam konteks waktu maupun individu. Hal ini disebabkan oleh dasar pendekatan yang digunakan dalam regresi data panel ini, yang mengabaikan dampak individu serta waktu pada konstruksi modelnya. Berikut persamaan regresinya antara lain :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan :

Y_{it} = Penerimaan Pajak Daerah

$\beta_{1...4}$ = Parameter yang menjadi dugaan

β_0 = Intersep

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto

X_2 = Jumlah Kunjungan Wisata

X_3 = Jumlah Kendaraan Bermotor

X_4 = Jumlah Kamar Hotel

ε = Error term

i = Provinsi

t = Tahun

ii.3.3.2 Fixed Effects Models

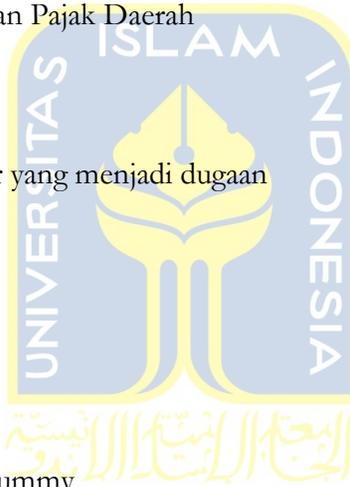
Model fixed effect, juga dikenal sebagai model Least Square Dummy Variables (LSDV), merujuk pada suatu pendekatan di mana nilai intercept berbeda untuk setiap subjek dalam penelitian lintas seksi (cross section), tetapi kemiringan (slope) pada setiap subjek tetap konstan sepanjang waktu (Damodar, 2012). Pendekatan model fixed effect didasarkan pada prinsip bahwa nilai intersep bervariasi di antara subjek-subjek, sementara kemiringan (slope) tetap konsisten di seluruh subjek. Untuk mengidentifikasi perbedaan antara subjek-subjek yang berbeda, diperlukan penggunaan variabel dummy (M. Kuncoro, 2011).

Dengan demikian, berikut bentuk formulasi persamaan fixed effect models yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \theta_1 D_{1i} + \dots + \theta_5 D_{5i} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan :

- Y_{it} = Penerimaan Pajak Daerah
- β_0 = Intercept
- $\beta_{1...4}$ = Parameter yang menjadi dugaan
- ε = Error
- i = Provinsi
- t = Tahun
- D_i = variabel dummy
- X_1 = Produk Domestik Regional Bruto
- X_2 = Jumlah Kunjungan Wisata
- X_3 = Jumlah Kendaraan Bermotor
- X_4 = Jumlah Kamar Hotel



iii.3.3.3 Random Effects Models

Dalam melakukan estimasi data panel menggunakan pendekatan model fixed effect yang menerapkan teknik Least Square Dummy Variables (LSDV), terdapat tanda-tanda ketidakpastian terkait dengan model yang digunakan. Solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi permasalahan ini

adalah melalui penggunaan model random effect. Model random effect juga memiliki tujuan untuk menanggulangi dampak dari derajat kebebasan yang dapat berpengaruh pada efisiensi parameter. Pendekatan model random effect diadopsi dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada model fixed effect yang memanfaatkan variabel dummy (Widarjono, 2009). Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi saat menganalisis menggunakan metode random effect, yakni data panel harus memiliki jumlah entitas yang lebih besar daripada jumlah koefisien yang ada (Winarno, 2017). Persamaan regresi pada model random effect sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \theta_1 D_{1i} + \dots + \theta_5 D_{5i} + u_i + e_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan :

Y_{it} = Penerimaan Pajak Daerah

β_0 = Intercept

$\beta_{1...4}$ = Parameter yang menjadi dugaan

ε = Error

i = Provinsi

t = Tahun

D_i = variabel dummy

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto

X_2 = Jumlah Kunjungan Wisata

X_3 = Jumlah Kendaraan Bermotor

X_4 = Jumlah Kamar Hotel

u_i = random error term



d. 3.4 Uji Pemilihan Model

Berdasarkan ketiga model regresi yang telah dipaparkan diatas , maka perlu dilakukannya pemilihan model yang terbaik sebagai model dalam sebuah penelitian. Untuk menentukan model yang terbaik maka dapat dilakukan dengan menggunakan 3 uji yang antara lain :

- Uji Chow (uji F)
- Uji Hausman
- Uji Lagrange Multiplier (LM)

i.3.4.1 Uji Chow (Uji F)

Uji Chow merupakan uji yang dapat digunakan saat untuk memilih antara common effect model dengan fixed effect model pada sebuah penelitian. Dengan kata lain, uji chow digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai model regresi mana yang cocok untuk penelitian yang sedang diteliti. Pada uji chow ini terdapat hipotesis yang antara lain :

H_0 : Common Effect model

H_a : Fixed Effect model

Dengan regresi panel persamaan sebagai berikut :

$$H_0: \theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_{33} = 0$$

$$H_a: \theta_1 \neq \theta_2 \neq \dots \neq \theta_{33} \neq 0$$

Berdasarkan regresi panel persamaan diatas perlu dilakukannya regresi sebanyak dua kali yaitu metode fixed dengan variabel dummy dan kemudian regresi metode common tanpa variabel dummy. Sehingga nilai F hitung sebagai berikut :

$$F = \frac{SSR_R - SSR_u / q}{SSR \frac{u}{(n-k)}}$$

Dimana SSR_R dan SSR_u merupakan dari sum of squared residuals metode common effect dan teknik fixed effect. Dan q merupakan jumlah variabel yang diuji dan n jumlah observasi dan k jumlah parameter estimasi metode fixed effect. Jika hasil datanya menyatakan menolak H_0 , maka metode fixed jadi yang lebih baik dan sebaliknya jika hasil datanya menyatakan gagal menolak H_0 , maka metode common jadi yang lebih baik.

ii.3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan bagian dari uji pemilihan model yang terbaik sebagai metode dalam penelitian. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan antara metode fixed effect atau metode random effect yang terbaik, sehingga dapat digunakan sebagai metode dalam penelitian. Uji hausman dilakukan setelah dilakukannya uji chow, jika uji chow yang telah dilakukan sebelumnya telah menunjukkan bahwa metode common effect yang tepat, maka tidak perlu melakukan uji hausman. Dan sebaliknya, jika uji chow telah menunjukkan bahwa metode fixed effect yang tepat, maka perlu dilakukannya uji hausman. Guna untuk menentukan mana yang tepat antara fixed effect dengan random effect. Untuk melakukan uji hausman maka perlu dilakukan sesuai dengan hipotesis yang antara lain :

H_0 : metode random effect lebih efisien dari metode fixed effect.

H_a : metode fixed effect lebih efisien dari metode random effect.

Selain itu uji hausman ini mengikuti distribusi chi square dengan degree of freedom sebanyak k , dimana k merupakan jumlah variabel independen.

iii.3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier atau yang biasa disingkat dengan Uji LM merupakan bagian dari pengujian dalam memilih model yang terbaik. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui model yang terbaik antara model Common Effect dengan Model Random Effect. Dalam Uji Lagrange Multiplier ini terdapat nilai residual yang berasal dari metode OLS yang ada pada model fixed effect dan ini merupakan dasar dari metode Breusch Pagan untuk menguji signifikan terhadap model Random Effect. Jika pada uji chow dan uji hausman sudah menunjukkan model yang terbaik, maka tidak perlu melakukan uji lagrange multiplier. Dan uji lagrange multiplier ini dapat diabaikan.

3.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berperan dalam mengukur sejauh mana sumbangan variabel independen dalam regresi mampu menjelaskan variasi dalam variabel terikatnya. Informasi mengenai nilai koefisien determinasi terletak dalam tabel Model Summary, yang dapat ditemukan dengan melihat angka R-square (R^2). Ketika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1, itu mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel tergantung. Sementara bila

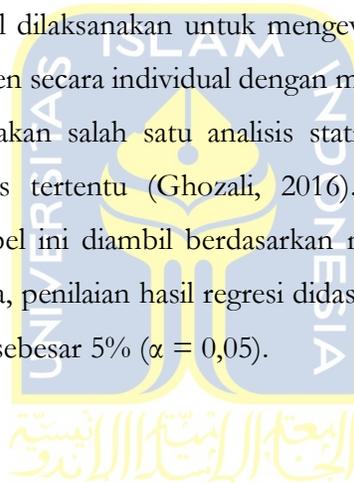
nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka 0 ($0 < R^2 < 1$), hal tersebut menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat terbatas dalam skala tertentu (Ghozali, 2016).

iv. 3.4.5 Uji F

Uji F dijalankan dengan maksud untuk mengidentifikasi apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki dampak pada variabel terikatnya (Ghozali, 2016). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5% atau 0,05. Keputusan mengenai signifikansi efek gabungan variabel-variabel ini diambil berdasarkan nilai F yang tercatat dalam tabel ANOVA.

v. 3.4.6 Uji t

Uji t atau uji parsial dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah terdapat dampak dari setiap variabel independen individual dengan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Uji t merupakan salah satu analisis statistik yang digunakan untuk menilai validitas suatu hipotesis tertentu (Ghozali, 2016). Keputusan mengenai signifikansi pengaruh variabel-variabel ini diambil berdasarkan nilai signifikansi yang tercatat dalam tabel Koefisien. Biasanya, penilaian hasil regresi didasarkan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

e. 4.1 Deskriptif Data Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan berjenis time series dengan jangka waktu 10 tahun yang terhitung dari tahun 2012-2021. Data yang digunakan berupa data Penerimaan Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Kamar Hotel yang ada di 6 provinsi pulau jawa. Penulis menganalisis menggunakan aplikasi e-views 12 dan dengan regresi data panel. Regresi data panel merupakan suatu metode analisis yang menggabungkan antara data cross section dengan time series. Regresi data panel terdiri dari 2 jenis yang antara lain :

a. Regresi Panel Statis

Pada regresi panel statis ini terdapat 3 metode yaitu metode common effect, fixed effect, random effect dan selain itu terdapat juga uji chow, uji hausman, uji lagrange multiplier.

b. Regresi Panel Dinamis

Pada regresi panel dinamis ini berbeda dengan regresi panel statis, regresi panel dinamis terdiri dari instrumental variabel dan GMM, metode panel kointegrasi, dan panel mean group.

Berdasarkan jenis regresi data panel yang telah dijelaskan diatas, maka pada penelitian ini penulis menggunakan regresi data panel yang berjenis regresi panel statis yang metodenya terdiri dari common effect, fixed effect, dan random effect. Guna mendukung lancarnya penelitian ini, maka dalam melakukan regresi panel statis penulis menggunakan 2 jenis variabel yang antara lain variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah Pajak Daerah (dalam juta rupiah), sedangkan variabel independen adalah X1: PDRB (dalam juta rupiah), X2: Jumlah kunjungan wisatawan (dalam satuan jiwa), X3: jumlah kendaraan bermotor (dalam satuan unit), dan X4: Jumlah Kamar Hotel (dalam satuan unit).

f. 4.2 Data Deskriptif Statistik

Data statistik deskriptif menggambarkan data atau memberikan deskripsi tentang data yang terdapat dalam suatu penelitian. Informasi ini dapat diperoleh melalui nilai-nilai seperti rata-rata (mean), deviasi standar, nilai tengah (median), nilai tertinggi (maksimum), dan nilai terendah

(minimum). Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk mengungkapkan informasi mengenai distribusi dan perilaku data pada setiap variabel yang diamati. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber statistik Badan Pusat Statistik (BPS), data tentang pengangguran, investasi dari luar negeri (penanaman modal asing), investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri), serta jumlah penduduk yang merupakan bagian dari angkatan kerja, kemudian diatur dalam bentuk tabel. Setelah itu, nilai-nilai seperti rata-rata, deviasi standar, median, nilai terendah, dan nilai tertinggi dari masing-masing variabel diinterpretasikan.

Tabel 4.1 Hasil Deskriptif Statistik

Prov. Banten					
Variabel	Pajak (Y)	PDRB (X1)	Wisatawan (X2)	Kendaraan (X3)	Hotel (X4)
Mean	8088555707,4	295571462	16779919,1	323908,1	59068,7
Median	6864610849,5	286415184,5	11413414	293143,5	49620,5
Standard Deviation	5331221203,80561	153486156,149381	11734277,8657401	97286,7636291461	44473,3983036801
Minimum	3069474218	143864977	6621617	207263	15997
Maximum	16670933203	460963020	38396859	493144	123399
Prov. Jakarta					
Mean	17621127119,6	153499937,5	23568683,5	364658,4	39359,5
Median	14764328437	149479253,5	19720172	244806	34723,5
Standard Deviation	16172981694,3077	25816679,5073095	20879180,8961144	216864,61208997	30259,1661567202
Minimum	2214729199	121858524	4300487	175839	10250
Maximum	37235687098	185607582	57494172	752091	74405
Prov. Jawa Barat					
Mean	10130166311,2	375481583,5	40818379,6	239306,5	52503,3

Median	8961036521,5	147217020,5	25514572,5	165109	49726,5
Standard Deviation	9483393926,01105	392979259,804277	44006583,1203461	119080,199289993	45371,3682429055
Minimum	1091749859	100349295	1451039	137715	9096
Maximum	23458576336	989336103	107451428	468055	101539
Prov. Jawa Tengah					
Mean	6172075418	934980392,6	171449492,2	524591,3	32834,4
Median	5773235789	940813178,5	63807773	472815,5	30559
Standard Deviation	5710364066,92165	52604786,3909574	224096771,135811	372704,016008846	27093,7679353266
Minimum	614004320	830016935	1938708	159909	6873
Maximum	12656260599	997345053	598382823	981292	62482
Prov. Yogya					
Mean	1347070067,4	654740243,7	11948555,2	588595	21694,1
Median	1329745765,5	861880501	11699049	545461,5	20988,5
Standard Deviation	359521558,412093	381895219,329161	8759940,1194499	327490,085515068	13951,8781328298
Minimum	898701050	104485469	2378983	259174	7838
Maximum	1773940605	980240159	24551526	992139	36482
Prov. Jawa Timur					
Mean	13631340642	140676018,4	66816162,3	182977,4	64144
Median	13561414371,5	144076784	43243699	190890	60410,5

Standard Deviation	1809339906,71164	22779958,8056415	45022927,6938211	35937,7990923206	21540,509676215
Minimum	11126793959	107543021	32789570	129165	38791
Maximum	15700864401	166874944	158616085	227745	89690

g. 4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

i.4.3.1 Model Common Effect

Common Effects Models merupakan salah satu regresi yang mengkombinasikan antara data time series dengan cross section. Dalam metode ini baik dimensi individu ataupun waktu tidak diperhatikan. Dan dalam model ini untuk mendapatkan perolehan hasil maka menggunakan ordinary least square (OLS). Berikut hasil olah data menggunakan model common effect :

Tabel 4.2 Hasil Uji *Common Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
log(PDRB)	-0.204424	0.113585	-1.799748	0.0776
log(WISATAWAN)	0.340296	0.100241	3.394789	0.0013
log(KENDARAAN)	-0.752595	0.215702	-3.489040	0.0010
Log(HOTEL)	0.177461	0.152988	1.159966	0.2513
C	28.26738	4.361994	6.480381	0.0000
R-squared	0.753572	F-statistic		40.51828
Adjusted R-squared	0.734974	Prob(F-statistic)		0.000000

ii.4.3.2 Model Fixed Effect

Fixed Effects Models merupakan model dengan pendekatan yang memperhatikan perbedaan pada intersep, sedangkan untuk slope antar unit tetap sama

Metode ini sering disebut dengan least square dummy variabel. Pada metode ini untuk mengetahui perbedaan intersep maka diperlukan variabel dummy (Widarjono Agus, 2018). Berikut hasil olah data menggunakan model fixed effect :

Tabel 4.3 Hasil Uji Fixed Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob
log(PDRB)	0.248217	0.101943	2.434855	0.0187
log(WISATAWAN)	0.518537	0.082412	6.292009	0.0000
log(KENDARAAN)	-0.378122	0.176068	-2.147589	0.0368
log(HOTEL)	0.165885	0.110711	1.498364	0.1406
C	11.88499	4.157174	2.858912	0.0063
R-squared	0.902275	F-statistic		49.24153
Adjusted R-squared	0.883951	Prob(F-statistic)		0.000000

iii.4.3.3 Model Random Effect

Model ini bersifat asumsional bahwa pengaruh dari kelompok tidak memiliki korelasi dengan faktor-faktor regresi. Pendekatan Efek Tetap (FEM) mengukur hubungan berdasarkan variasi waktu di dalam unit cross section tertentu. Efek Antar Kelompok (Between Effect/BE) mengukur hubungan ini melalui variasi yang terjadi antar kelompok pada berbagai periode waktu. Sementara Pendekatan Efek Acak (Random Effects Model/REM) merupakan kombinasi dari kedua metode tersebut. REM berdasarkan asumsi bahwa variasi antar entitas bersifat acak dan tidak memiliki korelasi dengan prediktor atau variabel independen dalam model yang digunakan (Hakim, 2014). Berikut hasil olah data menggunakan model random effect :

Tabel 4.4 Hasil Uji Random Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob
log(PDRB)	0.195692	0.099247	1.971768	0.0539
log(WISATAWAN)	0.492586	0.081001	6.081274	0.0000
log(KENDARAAN)	-0.436524	0.172970	-2.523693	0.0146
log(HOTEL)	0.166566	0.110207	1.511393	0.1366

C	14.03870	4.036530	3.477914	0.0010
R-squared	0.827521	F-statistic		63.57075
Adjusted R-squared	0.814503	Prob(F-statistic)		0.000000

h. 4.4 Pemilihan Model Terbaik

Pada penelitian ini, regresi data panel digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat tiga model dalam regresi data panel yang antara lain Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect model. Selain itu, untuk menentukan model yang terbaik antara tiga model itu, maka dilakukan pengujian data menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk melihat model mana yang terbaik antara model fixed effect dengan model common, Sedangkan Uji Hausman digunakan untuk melihat model mana yang terbaik antara model random effect dengan model fixed effect.

i.4.4.1 Uji Chow

Pada uji *chow* dilakukan dengan tujuan untuk memilih model yang terbaik antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect* dengan hipotesis. jika hasil dari kedua model antara F hitung lebih besar dari F tabel maka menolak H₀, yang artinya menolak H₀. Begitupun sebaliknya, jika hasil antara F hitung dengan F tabel lebih besar F hitung maka gagal menolak H₀, yang artinya model *common effect* yang terbaik. (Widarjono, 2009) jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka gagal menolak H₀ dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

Tabel 4.5 Hasil Uji F-test/Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.607777	(5,48)	0.0000
Cross-section Chi-square	53.644829	5	0.0000

Berdasarkan pada tabel diatas, hasil pengujian *Uji Chow* dengan *Redundant Test* diperoleh nilai *cross-section chi-squared* sebesar 53.644829 dengan nilai Probabilitas sebesar 0.0000 yang artinya < 5% atau 0,05. Karena semua hasil pengujian terhadap model memiliki nilai

Probabilitas F-statistik $< \alpha = 5\%$, atau 0,05, maka model yang terbaik yang akan digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Dari hasil pengujian diatas, maka akan ditentukan apakah akan menggunakan *model fixed effect* ataukah *random effect*. Untuk dilakukan perhitungan dengan *model random effect* yang akan dibandingkan dengan *model fixed effect* dengan menggunakan *uji Hausman test*.

ii.4.4.2 Uji Hausman

Pada uji *Hausmen* dilakukan dengan tujuan untuk memilih model yang terbaik antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji *Hausmen* digunakan apabila pada pengujian sebelumnya yaitu *Uji Chow* didapatkan model terbaiknya yaitu model *Fixed Effect*. Dan apabila diketahui pada hasil yang didapatkan yaitu P-value signifikan atau $>0,05$ maka model yang terbaik adalah *Random Effect*, dan apabila P-value tida signifikan atau $<0,05$ maka model yang terbaiknya adalah *Fixed Effect*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects – Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Square.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.442561	4	0.2448

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa hasil pengujian *Uji Hausmen Test* dengan *Test cross-section random effect* diperoleh nilai *cross-section random* sebesar 5.442561 dengan nilai Probabilitas sebesar 0.2448 yang artinya $>5\%$ (0.0500). maka model yang terbaik yang akan digunakan adalah model *Random effect*

Berdasarkan hasil dari pengujian kedua model antara *Uji Chow* dengan *Uji Hausman Test*, maka didapatkan hasil yang menyatakan keduanya model *Random Effect* yang terbaik, jadi kesimpulannya model *Random Effect* yang terbaik yang dapat digunakan untuk analisis regresi pada penelitian ini.

iii.4.4.3 Hasil Uji

Tabel 4.7 Hasil Uji Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
LOG(PDRB)	0.195692	0.099247	1.971768	0.0539
LOG(WISATAWAN)	0.492586	0.081001	6.081274	0.0000
LOG(KENDARAAN)	-0.436524	0.172970	-2.523693	0.0146
LOG(HOTEL)	0.166566	0.110207	1.511393	0.1366
C	14.03870	4.036530	3.477914	0.0010

Tabel diatas merupakan hasil analisis yang telah dilakukan pengujian melalui uji Chow dan uji Hausman. Dari pengujian uji chow dan uji hausman tersebut maka didapatkan bahwa model yang terbaik adalah Model Random Effect.

i. 4.5 Pengujian Hipotesis

i.4.5.1 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi

R-Squared	0.827521
Adjusted R-square	0.814503
S.E. of regression	0.425579
F-statistic	63.57075
Prob (F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel Uji Koefisien Determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai R² memiliki nilai sebesar 0.827521. yang artinya bahwa variabel terikat pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 82.7% dan sisa nya sebesar 17.3% dijelaskan oleh variabel yang diluar model ini.

ii.4.5.2 Uji F

Tabel 4.9 Uji F

R-Square	0.827521
Adjusted R-square	0.814503
S.E. of regression	0.425579
F-statistic	63.57075
Prob (F-statistic)	0.000000

Berdasarkan penjabaran pada tabel diatas, nilai f-statistic sebesar 63.57075 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. nilai probabilitas tersebut lebih kecil daripada α 5%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.

iii.4.5.3 Uji t

Tabel 5.0 Uji t

Variabel	Coefficient	Prob.	Keterangan
Log(PDRB)	0.195692	0.0539	Signifikan 5%
Log(WISATAWAN)	0.492586	0.0000	Signifikan 1%
Log(KENDARAAN)	-0.436524	0.0146	Signifikan 1%
Log(HOTEL)	0.166566	0.1366	Signifikan 10%

A. Uji t koefisien Variabel X1 (PDRB)

Berdasarkan tabel diatas pada variabel PDRB (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.195692 dengan nilai Probabilitas sebesar $0.0539/2 = 0.02695$ hal itu menunjukkan bahwasannya nilai probabilitas variabel PDRB lebih kecil dari pada $\alpha=5\%$ dan menyatakan menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.

B. Uji t koefisien variabel X2 (WISATAWAN)

Berdasarkan tabel diatas pada variabel WISATAWAN (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.492586 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. hal itu menunjukkan bahwasannya nilai probabilitas variabel WISATAWAN lebih kecil daripada $\alpha=1\%$ dan menyatakan menerima H_a . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel WISATAWAN berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Dan secara hipotesis nya menyatakan bahwa variabel WISATAWAN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

C. Uji t koefisien variabel X3 (KENDARAAN)

Berdasarkan tabel diatas pada variabel KENDARAAN (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0.436524 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0146/2=0.0073$. hal itu menunjukkan bahwasannya nilai probabilitas variabel KENDARAAN lebih kecil daripada $\alpha=1\%$ dan menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel KENDARAAN berpengaruh signifikan akan tetapi memiliki hubungan yang negatif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Dan secara hipotesis nya menyatakan bahwa variabel KENDARAAN berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

D. Uji t koefisien variabel X4 (HOTEL)

Berdasarkan tabel diatas pada variabel HOTEL (X4) memiliki nilai koefisien sebesar 0.166566 dengan nilai probabilitas sebesar $0.1366/2= 0.0683$ hal itu menunjukkan bahwasannya nilai probabilitas variabel HOTEL lebih kecil daripada $\alpha=10\%$ dan menyatakan menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel HOTEL berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa.

iv.4.5.4 Interpretasi Koefisien

Tabel 5.1 Interpretasi Koefisien

Variabel	Coefficient	Prob.	Keterangan
Log(PDRB)	0.195692	0.0539	Signifikan
Log(WISATAWAN)	0.492586	0.0000	Signifikan
Log(KENDARAAN)	-0.436524	0.0146	Signifikan
Log(HOTEL)	0.166566	0.1366	Signifikan

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada variabel PDRB (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.195692 berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa. Maka ketika PDRB naik sebesar 1%, penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa akan naik sebesar 19,56%.
- Jumlah Kunjungan Wisatawan (WISATAWAN)
Pada variabel WISATAWAN (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.492586 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa. Maka ketika Jumlah Kunjungan Wisatawan naik sebesar 1%, penerimaan Pajak Daerah di 6 provinsi pulau jawa naik sebesar 49,25%.

- Jumlah Kendaraan Bermotor (KENDARAAN)
Pada variabel KENDARAAN (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0.436524 berpengaruh signifikan akan tetapi memiliki hubungan yang negatif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa. ketika penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa naik sebesar 1%, maka akan menurunkan jumlah kendaraan bermotor di 6 provinsi pulau jawa sebesar 43,65%.
- Jumlah Kamar Hotel (HOTEL)
Pada variabel HOTEL (X4) memiliki nilai koefisien sebesar 0.166566 berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 Provinsi Pulau Jawa. Maka ketika Jumlah Kamar Hotel naik sebesar 1%, penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa naik sebesar 16,65%.

j. 4.6 Hasil Analisis Data

i.4.6.1 Analisis PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa pada tahun 2012-2021. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien variabel PDRB yang nilainya sebesar 0.195692. Yang artinya bahwa jika PDRB naik sebesar 1%, maka penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa mengalami kenaikan. Hal ini selaras dengan pernyataan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu (Sari & Ilyas, 2019) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hubungan antara PDRB dan pajak daerah sangat erat karena PDRB dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu. Ketika ekonomi suatu daerah tumbuh, hal ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan pendapatan ini kemudian dapat mendorong peningkatan dalam tingkat konsumsi karena orang memiliki lebih banyak sumber daya untuk dihabiskan. Dengan adanya peningkatan kemampuan individu untuk membayar pajak sebagai akibat dari peningkatan pendapatan, penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah juga dapat meningkat. (Nurrohman, 2010).

ii.4.6.2 Analisis Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan menyatakan bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa pada tahun 2012-2021. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien variabel Wisatawan yang nilainya sebesar 0.492586. Yang artinya bahwa jika Jumlah Kunjungan Wisatawan naik sebesar 1%, maka penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa ikut mengalami kenaikan sebesar 0.492586%. Hal ini selaras pada penelitian (Syarifah,2018) yang menyatakan Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pajak daerah. Dikarenakan semakin banyaknya pengunjung wisatawan yang berkunjung ke tempat rekreasi, maka semakin banyak juga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

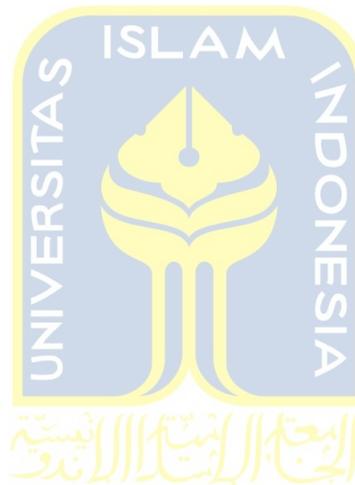
iii.4.6.3 Analisis Kendaraan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan menyatakan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa pada tahun 2012-2021. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien variabel Kendaraan yang nilainya sebesar -0.436524. Yang artinya bahwa jika penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa naik sebesar 1%, maka akan menurunkan jumlah kendaraan bermotor di 6 provinsi pulau jawa sebesar 0.436524%. Hal ini tidak selaras dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu (Mery, 2017) menyatakan bahwa Jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk, yang mengakibatkan kemungkinan bagi penduduk untuk membeli kendaraan bermotor. Akibatnya, penerimaan pajak atas kendaraan bermotor juga meningkat secara bersamaan. Sudah kita ketahui, bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari jenis pajak daerah.

iv.4.6.4 Analisis Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan menyatakan bahwa Jumlah Kamar Hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa pada tahun 2012-2021. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien variabel Hotel yang nilainya sebesar 0.166566. Yang artinya bahwa jika Jumlah Kamar Hotel naik sebesar 1%, maka penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa mengalami kenaikan. Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu. (Daniel, 2020) menjelaskan bahwa

Jumlah Kamar berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah kamar hotel dan semakin banyak jumlah kamar hotel yang terjual, maka tingkat penghunian terhadap kamar hotel akan meningkat juga, sehingga menyebabkan meningkatnya potensi penerimaan pajak hotel. (Jamli, 1997) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat hunian kamar hotel memberikan gambaran semakin besar potensi pariwisata daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperbesar potensi pajak daerah yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan.



BAB V

Simpulan dan Implikasi

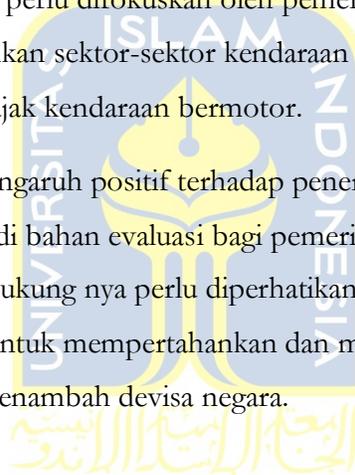
k. 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian yang telah dilakukan diatas yang menggunakan berbagai model dan pemilihan model terbaik, maka hasil nya menunjukkan bahwa Model Random Effect menjadi model yang terbaik untuk digunakan pada penelitian ini. Dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar PDRB maka semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat juga. Dan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, sehingga dapat mengakibatkan naiknya penerimaan pajak daerah.
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (WISATAWAN) berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah mengenai pajaknya ke semua faktor pendukung obyek wisata.
3. Jumlah Kendaraan Bermotor (KENDARAAN) berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia semakin bertambah tahun semakin banyak yang memiliki kendaraan pribadi dan tingkat kesadaran pemilik kendaraan terhadap pajak semakin tinggi juga.
4. Jumlah Kamar Hotel (HOTEL) berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah optimal untuk mencegah dan menindak tegas pemilik perusahaan hotel agar membayar pajak.

1. 5.2 Implikasi

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Pemerintah perlu memanfaatkan sektor-sektor yang tersedia dengan optimal guna meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah.
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Hal ini perlu dipertahankan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna untuk menambah devisa negara.
3. Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Hal ini perlu difokuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempertahankan sektor-sektor kendaraan bermotor guna untuk menambah devisa negara dari sektor pajak kendaraan bermotor.
4. Jumlah Kamar Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di 6 provinsi pulau jawa. Ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. beberapa sektor pendukung nya perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Guna untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Agar dapat menambah devisa negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, HAW.. (2011). Otonomi daerah dan daerah otonom / HAW. Widjaja. Jakarta :: Rajawali Pers,.
- Tambunan, Tulus T.H., 1958-. (2001). Perekonomian Indonesia : teori dan temuan empiris / Tulus T.H. Tambunan. Jakarta :: Ghalia Indonesia,.
- Saragih, Juni Panglima. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi / Juli Panglima Saragih ; editor, M. Syofian Khadafih. Jakarta :: Ghalia Indonesia,.
- Anatoly Aditya Saputra. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Cilegon. *Skripsi*.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA |Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018). *Akuntansi Dan Pembangunan*, 19(2), 1–16.
- Sari, D. P., & Ilyas, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 75–85.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.75-85>
- Sumitro, Rokhmat. (1977). Dasar-dasar hukum pajak pendapatan 1944 / Rochmat Soemitro. Bandung :: Eresco,.
- Soemahamidjaja, Soeparman. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Bandung: Universitas Padjajaran.2006
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Andi Offset.
- Smith, Adam. An Inquiry into the nature and causes of the wealth of Nations. London : F.C. and J. Rivington , 1812
- Siahaan, Marihot P. , 1973-. (2005). Pajak daerah & retribusi daerah / Marihot P. Siahaan. Jakarta :: Raja Grafindo Persada,.
- Simanjuntak, Thamrin, 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah , Bunga Rampai

Manajemen Keuangan daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Irawan, Koko. 2010. “Potensi Obyek Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata”. Yogyakarta : Kertas Karya.

Hakim, A. (2014). Pengantar ekonometrika dengan aplikasi Eviews. Yogyakarta: Ekonisia.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Agus, W. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.

Winarno, W. W. (2017). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. 1–23.

Damodar, P. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku 2) (Edisi 5) (5th ed.). Jakarta : Salemba Empat. http://perpus.ekuitas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=94311

Kuncoro, M. (2011). Metode kuantitatif : Teori dan aplikasinya untuk bisnis dan ekonomi (4th ed.). Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=17539>



LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Penerimaan Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Kamar Hotel di 6 provinsi pulau jawa

PROVINSI	Tahun	Pajak	Pdrb	Wisatawan	Kendaraan	Hotel
BANTEN	2012	3398472278	144933317	8143614	315827	109369
BANTEN	2013	3718499635	154072660	6621617	431234	123399
BANTEN	2014	4023156316	162693362	13767578	358125	103155
BANTEN	2015	3069474218	147498946	7874397	419493	79112
BANTEN	2016	3117070009	143864977	9009667	493144	82908
BANTEN	2017	9706065383	410137007	9551703	207263	15997
BANTEN	2018	10320366318	433782713	13275125	227437	18579
BANTEN	2019	11201873159	456620033	30709360	268196	18900
BANTEN	2020	15659646555	441148585	30449271	247902	19139
BANTEN	2021	16670933203	460963020	38396859	270460	20129
DKI JAKARTA	2012	2231848167	121858524	4300487	279557	10250
DKI JAKARTA	2013	2816261396	128052588	4520927	429800	10642
DKI JAKARTA	2014	2765968006	133283856	14600304	579832	11562
DKI JAKARTA	2015	2214729199	130864325	4399364	630515	11010
DKI JAKARTA	2016	2631763313	135422592	4506915	752091	11510
DKI JAKARTA	2017	36500782687	163535915	24840040	175839	57885
DKI JAKARTA	2018	37235687098	173520829	24967080	187845	74405
DKI JAKARTA	2019	32865934657	183624055	57494172	198832	73926
DKI JAKARTA	2020	26712395478	179229109	44352288	202218	64059
DKI JAKARTA	2021	30235901195	185607582	51705258	210055	68346
JAWA BARAT	2012	1091749859	895449067	2398510	161733	9096
JAWA BARAT	2013	1354700324	945662589	2745542	258845	9519
JAWA BARAT	2014	1438977523	100349295	7249983	349193	9644
JAWA BARAT	2015	1243223219	989336103	1451039	382115	9562
JAWA BARAT	2016	1415408749	102481473	1727916	468055	9956
JAWA BARAT	2017	16483095520	134366214	43779162	137715	89497
JAWA BARAT	2018	18153616036	141962414	53203387	148135	95226
JAWA BARAT	2019	19626352311	149095969	107451428	157715	97604

JAWA BARAT	2020	17035963235	145338072	90818341	161074	93390
JAWA BARAT	2021	23458576336	150774639	97358488	168485	101539
JAWA TENGAH	2012	614004320	830016935	2963742	757342	6873
JAWA TENGAH	2013	688866500	883100567	3370736	823665	7025
JAWA TENGAH	2014	864165450	940535209	8720256	892333	7515
JAWA TENGAH	2015	752 773 245	934457227	1938708	914779	7080
JAWA TENGAH	2016	973 773 245	972763667	2509188	981292	7573
JAWA TENGAH	2017	10572698333	893750302	411825911	159909	53545
JAWA TENGAH	2018	11507119643	941091148	431105982	169379	58010
JAWA TENGAH	2019	11951919535	991516542	598382823	177932	59564
JAWA TENGAH	2020	11139173310	965227276	118895290	180993	58677
JAWA TENGAH	2021	12656260599	997345053	134782286	188289	62482
DI YOGYAKARTA	2012	983887128	794840365	2759200	790208	7838
DI YOGYAKARTA	2013	1052296155	842497257	4313069	852189	8164
DI YOGYAKARTA	2014	1050089444	890092612	6899359	912397	8490
DI YOGYAKARTA	2015	898701050	881263745	2378983	929382	9108
DI YOGYAKARTA	2016	1075616467	917909305	3690956	992139	8854
DI YOGYAKARTA	2017	1583875064	923002434	16498739	259174	32869
DI YOGYAKARTA	2018	1717291718	980240159	17858137	272525	35717
DI YOGYAKARTA	2019	1773940605	104485469	18060595	286141	36482
DI YOGYAKARTA	2020	1646559199	105698523	22474988	291080	34386
DI YOGYAKARTA	2021	1688443844	107372568	24551526	300715	35033
JAWA TIMUR	2012	11126793959	107543021	32789570	129165	38791
JAWA TIMUR	2013	11405679516	116704329	34678943	137569	40452
JAWA TIMUR	2014	12264509123	118906754	35092416	147928	44203
JAWA TIMUR	2015	12497148704	122104567	40996237	164562	49609
JAWA TIMUR	2016	12772227117	139923610	42798125	187543	49609
JAWA TIMUR	2017	14350601626	148229958	43689273	194237	71212
JAWA TIMUR	2018	15060713325	156344182	53244287	205057	82219
JAWA TIMUR	2019	15522201423	164989564	99579825	215953	87278
JAWA TIMUR	2020	15612667226	165139255	126676862	220015	88377
JAWA TIMUR	2021	15700864401	166874944	158616085	227745	89690

Keterangan :

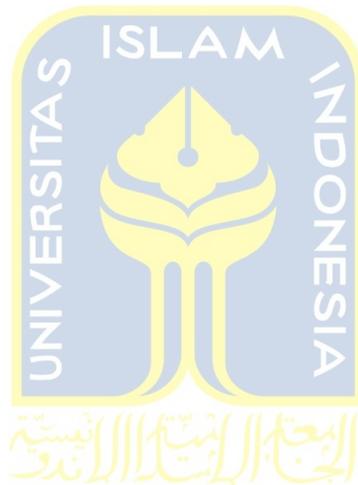
Pajak : Penerimaan Pajak Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Wisatawan : Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kendaraan : Jumlah Kendaraan Bermotor

Hotel : Jumlah Kamar Hotel



Lampiran 2

Model Common Effect

Dependent Variable: LOG(PAJAK)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/21/23 Time: 02:26
Sample: 2012 2021
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (unbalanced) observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	-0.204424	0.113585	-1.799748	0.0776
LOG(WISATAWAN)	0.340296	0.100241	3.394789	0.0013
LOG(KENDARAAN)	-0.752595	0.215702	-3.489040	0.0010
LOG(HOTEL)	0.177461	0.152988	1.159966	0.2513
C	28.26738	4.361994	6.480381	0.0000
R-squared	0.753572	Mean dependent var		22.39045
Adjusted R-squared	0.734974	S.D. dependent var		1.232620
S.E. of regression	0.634561	Akaike info criterion		2.010497
Sum squared resid	21.34140	Schwarz criterion		2.188121
Log likelihood	-53.30440	Hannan-Quinn criter.		2.079685
F-statistic	40.51828	Durbin-Watson stat		0.337238
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 3

Model Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(PAJAK)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/21/23 Time: 02:30
Sample: 2012 2021
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (unbalanced) observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	0.248217	0.101943	2.434855	0.0187
LOG(WMSATAWAN)	0.518537	0.082412	6.292009	0.0000
LOG(KENDARAAN)	-0.378122	0.176068	-2.147589	0.0368
LOG(HOTEL)	0.165885	0.110711	1.498364	0.1406
C	11.88499	4.157174	2.858912	0.0063

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.902275	Mean dependent var	22.39045
Adjusted R-squared	0.883951	S.D. dependent var	1.232620
S.E. of regression	0.419903	Akaike info criterion	1.258000
Sum squared resid	8.463290	Schwarz criterion	1.613248
Log likelihood	-26.48199	Hannan-Quinn criter.	1.396376
F-statistic	49.24153	Durbin-Watson stat	0.828715
Prob(F-statistic)	0.000000		

30 DILE DILIGI

Lampiran 4

Model Random Effect

Dependent Variable: LOG(PAJAK)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/21/23 Time: 02:34
 Sample: 2012 2021
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 6
 Total panel (unbalanced) observations: 58
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	0.195692	0.099247	1.971768	0.0539
LOG(VMSATAWAN)	0.492586	0.081001	6.081274	0.0000
LOG(KENDARAAN)	-0.436524	0.172970	-2.523693	0.0146
LOG(HOTEL)	0.166566	0.110207	1.511393	0.1366
C	14.03870	4.036530	3.477914	0.0010

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.622878	0.6875
Idiosyncratic random		0.419903	0.3125

Weighted Statistics			
R-squared	0.827521	Mean dependent var	4.739564
Adjusted R-squared	0.814503	S.D. dependent var	1.000306
S.E. of regression	0.425579	Sum squared resid	9.599233
F-statistic	63.57075	Durbin-Watson stat	0.680388
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.638066	Mean dependent var	22.39045
Sum squared resid	31.34460	Durbin-Watson stat	0.208368

Lampiran 5

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.607777	(5,48)	0.0000
Cross-section Chi-square	53.644829	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOG(PAJAK)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/21/23 Time: 02:41
Sample: 2012 2021
Periods included: 10
Cross-sections included: 6
Total panel (unbalanced) observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	-0.204424	0.113585	-1.799748	0.0776
LOG(WMSATAWAN)	0.340296	0.100241	3.394789	0.0013
LOG(KENDARAAN)	-0.752595	0.215702	-3.489040	0.0010
LOG(HOTEL)	0.177461	0.152988	1.159966	0.2513
C	28.26738	4.361994	6.480381	0.0000
R-squared	0.753572	Mean dependent var		22.39045
Adjusted R-squared	0.734974	S.D. dependent var		1.232620
S.E. of regression	0.634561	Akaike info criterion		2.010497
Sum squared resid	21.34140	Schwarz criterion		2.188121
Log likelihood	-53.30440	Hannan-Quinn criter.		2.079685
F-statistic	40.51828	Durbin-Watson stat		0.337238
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.442561	4	0.2448

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PDRB)	0.248217	0.195692	0.000542	0.0241
LOG(WISATAWAN)	0.518537	0.492586	0.000231	0.0875
LOG(KENDARAAN)	-0.378122	-0.436524	0.001081	0.0757
LOG(HOTEL)	0.165885	0.166566	0.000111	0.9486

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PAJAK)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/21/23 Time: 02:49

Sample: 2012 2021

Periods included: 10

Cross-sections included: 6

Total panel (unbalanced) observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.88499	4.157174	2.858912	0.0063
LOG(PDRB)	0.248217	0.101943	2.434855	0.0187
LOG(WISATAWAN)	0.518537	0.082412	6.292009	0.0000
LOG(KENDARAAN)	-0.378122	0.176068	-2.147589	0.0368
LOG(HOTEL)	0.165885	0.110711	1.498364	0.1406

Effects Specification

Cross-section fixed (dummyvariables)

R-squared	0.902275	Mean dependent var	22.39045
Adjusted R-squared	0.883951	S.D. dependent var	1.232620
S.E. of regression	0.419903	Akaike info criterion	1.258000
Sum squared resid	8.463290	Schwarz criterion	1.613248
Log likelihood	-26.48199	Hannan-Quinn criter.	1.396376
F-statistic	49.24153	Durbin-Watson stat	0.828715
Prob(F-statistic)	0.000000		